

---

## PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP) TERHADAP OPINI AUDIT PEMERINTAH DAERAH ATAS LKPD KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA UTARA TA 2020

Oleh

Meniq Anjas Wahyuni<sup>1</sup>, Ana Sopanah<sup>2</sup>, Endah Puspitosarie<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang

E-mail: <sup>1</sup>[niq411@gmail.com](mailto:niq411@gmail.com), <sup>2</sup>[anasopanah@gmail.com](mailto:anasopanah@gmail.com), <sup>3</sup>[puspitosarieendah@gmail.com](mailto:puspitosarieendah@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 10-10-2023

Revised: 19-10-2023

Accepted: 13-11-2023

### Keywords:

Audit, TLRHP, Opini Audit

**Abstract:** Opini audit adalah pernyataan tertulis mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material. Pemerintah daerah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara, dan laporan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Opini tersebut didasarkan pada evaluasi bukti audit yang diperoleh dari temuan audit. Berdasarkan temuan yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan akan memberikan rekomendasi perbaikan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi. Tahun 2020 menjadi tahun penelitian yang penting karena pada tahun tersebut terdapat salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten/kota dengan opini non-WTP paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi logistik dan melibatkan data sekunder berupa dokumentasi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah dari Sumatera Utara tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Opini Audit pemerintah daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap Opini Audit pemerintah daerah. Secara simultan Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Opini Audit pemerintah daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

---

## PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan

---

dana publik kepada masyarakat serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Laporan keuangan pemerintah adalah laporan yang penting dalam akuntansi sektor publik karena memberikan informasi tentang bagaimana pemerintah mengelola keuangannya. Laporan keuangan ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sebagai izin transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian akan diaudit oleh BPK. Audit dilakukan untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik dan menilai apakah laporan keuangan wajar sesuai standar yang berlaku (Anggarani dkk., 2021).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini yang diinginkan oleh semua pemerintah daerah. BPK bertugas untuk memastikan bahwa pemerintah telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bahwa tidak terjadi salah saji yang dapat menimbulkan kerugian pada negara. Opini audit juga merupakan kesimpulan dari melihat atas Laporan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang lengkap atau telah selesai diperiksa (Pratama & Maslichah, 2022).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi opini audit adalah hasil temuan audit, yang terdiri dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketidakpatuhan terhadap peraturan-undangan. Temuan audit BPK atas pelaporan keuangan pemerintah daerah menemukan adanya kelemahan SPI dan pelanggaran Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan sangat penting, terutama untuk meminimalisir dampak penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah langkah atau keputusan yang diambil oleh pejabat yang diperiksa atau pihak yang berwenang untuk menjalankan rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK. Penentuan opini sangat bergantung dari nilai temuan audit, dan seharusnya nilai temuan untuk opini non Wajar Tanpa Pengecualian (non-WTP) akan lebih material jika dibandingkan opini WTP. Namun, untuk membuktikan secara empiris apakah temuan audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada pemerintah daerah berpengaruh terhadap audit opini maka perlu dilakukan penelitian dengan melakukan analisis terhadap LHP – LKPD dan juga terdapat banyak laporan keuangan daerah kabupaten/kota di tahun 2020 yang mendapatkan opini selain itu WTP.

Tahun 2020 menjadi tahun penelitian yang penting karena pada tahun tersebut terdapat salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten/kota dengan opini non-wtp paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya. Penelitian ini akan melibatkan 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Alasan pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki ciri-ciri ekonomi dan geografis yang serupa, namun secara teoritis dan empiris berbeda dengan daerah Jawa-Bali (Siregar & Rudiansyah, 2019).

Menurut hasil audit BPK, opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota/kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Rata-rata kenaikan opini WTP kabupaten/kota di Sumatera Utara selalu konsisten setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan opini. Satu kabupaten yang sebelumnya mendapatkan opini WTP mengalami penurunan menjadi opini WDP.

Kabupaten Padang Lawas telah menerima opini WTP selama empat tahun berturut-turut, namun kini harus enggan menerima opini WDP karena temuan keuangan yang tidak sesuai prosedur. Temuan-temuan tersebut antara lain temuan ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja fisik dan non fisik, penggunaan keuangan yang tidak wajar, dan pembuat kebijakan keuangan atau TAPD yang tidak kompeten. Hal ini mengakibatkan catatan keuangan yang buruk dan menyoroti perlunya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2018) menyatakan bahwa Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan audit terkait Kepatuhan memiliki pengaruh terhadap opini audit. Semakin tinggi temuan audit terkait SPI dan ketidakpatuhan, maka opini yang diberikan akan semakin rendah. Dalam penelitian ini, temuan SPI yang paling umum ditemukan terkait Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan (KSPAP), serta Kelemahan Sistem Pengendalian Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (KSPAPB). Kesimpulan audit yang paling umum ditemukan adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah dan kekurangan penerimaan.

## LANDASAN TEORI

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari tiga bagian, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk memastikan akuntabilitas, laporan keuangan tersebut harus disertai dengan pernyataan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pernyataan tersebut mencakup tanggung jawab Kepala SKPD atas laporan keuangan SKPD dan menyatakan bahwa laporan tersebut telah disusun dengan mematuhi sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Opini Audit

Opini audit adalah sebuah pernyataan tertulis yang menyertai laporan keuangan, menunjukkan apakah laporan tersebut memenuhi prinsip akuntansi yang diterima umum dan telah diperiksa oleh auditor. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat (11) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara definisi opini audit yaitu Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari tiga bagian, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk memastikan akuntabilitas, laporan keuangan tersebut harus disertai dengan pernyataan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pernyataan tersebut mencakup

tanggung jawab Kepala SKPD atas laporan keuangan SKPD dan menyatakan bahwa laporan tersebut telah disusun dengan mematuhi sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan yang menggambarkan hasil dari proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Opini ini penting karena memberikan penilaian independen tentang kualitas dan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tersebut. Opini audit ini disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang berisi kesimpulan dan temuan-temuan dari pemeriksaan.

### **Temuan Audit**

Menurut (Sawyer dkk., 2006) merupakan persoalan penting yang ditemukan selama proses audit dan perlu disampaikan kepada entitas yang diaudit karena dapat mempengaruhi perbaikan dan peningkatan kinerja, efisiensi, dan efektivitas secara ekonomis. Temuan tersebut perlu dikomunikasikan karena mempunyai dampak material yang signifikan bagi entitas yang diaudit. (Alfiani & Nurbaiti, 2017) menyatakan bahwa tingkat materialitas lebih penting dibandingkan seberapa sering temuan tersebut ditemukan. Penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma atau kriteria yang dapat diterima disebut temuan audit (audit finding). Temuan audit merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan ditemukan oleh auditor pada saat pemeriksaan (Sari dkk., 2018).

### **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)**

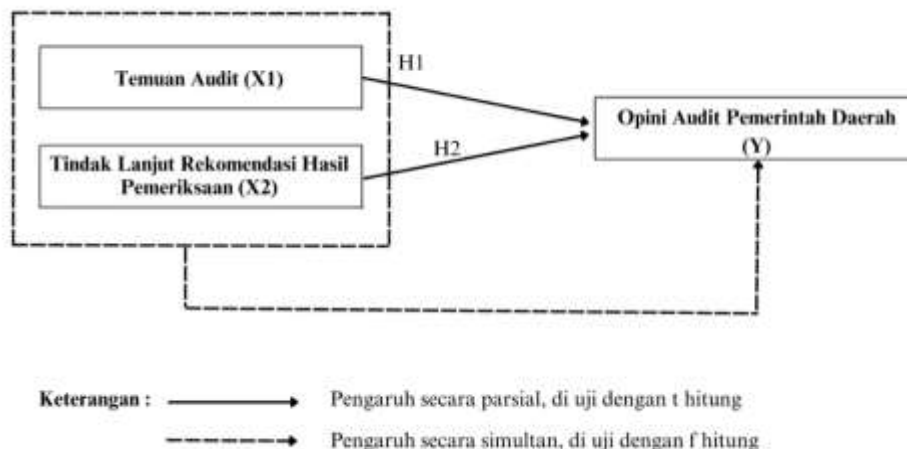
Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017), rekomendasi adalah saran yang diberikan oleh pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan kepada individu atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat yang melakukan pemeriksaan memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menyertakan jawaban dan penjelasan yang lengkap. Selanjutnya, BPK akan mengevaluasi jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh BPK.

### **PenelitianTerdahulu**

1. Salwah Dwita Apriastanti dan Tituk Diah Widajantie (2022) yang berjudul “Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah” memiliki persamaan variable x.
2. Ghina Imtinan dan David Hasibuan (2021) yang berjudul “Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian” memiliki persamaan variable x dan menggunakan regresi logistic.
3. Rafrini Amyulianthy, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, dan Shinta Budi (2020) yang berjudul “Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit” memiliki hasil penelitian yang berbeda.

### Kerangka Pikir Penelitian

Dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang diungkapkan di atas yang telah dimuat, maka kerangka konseptual pada riset ini:



### Hipotesis

H1: Temuan Audit berpengaruh secara parsial terhadap opini audit.

H2: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap Opini audit.

H3: Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit secara simultan berpengaruh terhadap opini audit.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh dalam wujud angka, skor, dan hasilnya menggunakan statistik. Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian kuantitatif digunakan untuk penelitian populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data statistik serta bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Obyek penelitian yang penulis teliti adalah Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X2), dan opini audit (Y) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 (LHP LKPD tahun 2020).

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain yang bukan pengolahnya (Siregar & Rudiansyah, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data opini audit, jumlah temuan audit, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang di audit oleh BPK RI. Dalam penelitian ini populasi yang di ambil berjumlah 33 LKPD diantaranya terdiri dari 8 kota dan 25 kabupaten yang berada di Sumatera Utara tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah hasil eksplorasi dokumentasi BPK RI dalam IHPD 2021 dan LHP-LKPD TA 2020.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Uji Statistik Deskriptif**

**1 Hasil Stastistik Deskripsif Data Berskala Nominal**

<b>Opini Audit</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Non-WTP	10	30.3	30.3	30.3
	WTP	23	69.7	69.7	100.0
	Total	33	100.0	100.0	

Sumber: output SPSS 24 (2023)

Berdasarkan table 1 hasil stastistik deskriptif data berskala nominal yakni variable dependen (Y) Opini Audit yang menunjukkan hasil bahwa dari total 33 data unit analisis, terdiri dari 23 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini audit WTP dan 10 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini audit Non-WTP. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 terdapat 30.3% dari 100% pemerintah daerah memperoleh opini audit Non-WTP sedangkan 69.7% pemerintah daerah memperoleh opini audit WTP.

**2 Hasil Stastistik Deskripsif Data Berskala Rasio**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Temuan Audit	33	6	16	10.27	2.908
TLRHP	33	.67	.95	.8212	.07360
Valid N (listwise)	33				

Sumber: output SPSS 24 (2023)

Berdasarkan tabel 4.2, terdapat dua variabel independen yaitu Temuan Audit (X1) dan TLRHP (X2) dalam analisis ini. Data yang digunakan adalah populasi sebanyak 33unit analisis. Untuk variabel Temuan Audit (X1), nilai minimum adalah 6 yang terdapat pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Gunungsitoli, dan Kabupaten Batubara. Sedangkan nilai maksimum adalah 16 yang terdapat pada Kota Medan.

Nilai rata-rata (mean) dari variabel Temuan Audit adalah 10,27. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah temuan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah 1.027% dari total jumlah temuan. Deviasi standar yang diperoleh untuk variabel ini adalah 2,908, yang mengindikasikan tingkat variasi atau dispersi data.

Untuk variabel TLRHP (X2), nilai minimum adalah 0,67 yang terdapat pada Kabupaten Nias Selatan, sedangkan nilai maksimum adalah 0,95 yang terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu Utara. Nilai rata-rata (mean) dari variabel TLRHP adalah 0,8212. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata TLRHP adalah 82,12% dari total rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Deviasi standar yang diperoleh untuk variabel ini adalah 0,07360.

## Analisis Regresi Logistik Biner

### 1. Overall Model Fit (Block Number 0)

Iteration History <sup>a,b,c</sup>			
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	40.499	.788
	2	40.485	.833
	3	40.485	.833
a. Constant is included in the model.			
b. Initial -2 Log Likelihood: 40.485			
c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.			

Sumber: output SPSS 24 (2023)

### 2. Overall Model Fit (Block Number 1)

Iteration History <sup>a,b,c,d</sup>					
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	Temuan Audit	TLRHP
Step 1	1	28.872	-11.969	.019	15.295
	2	26.939	-18.087	.031	23.036
	3	26.755	-20.725	.032	26.401
	4	26.753	-21.103	.032	26.886
	5	26.753	-21.110	.032	26.895
	6	26.753	-21.110	.032	26.895
a. Method: Enter					
b. Constant is included in the model.					
c. Initial -2 Log Likelihood: 40.485					
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.					

Sumber: output SPSS 24 (2023)

### 3. Hasil Overall Model Fit

Block Number=0	Block Number=1	Keterangan	
40,485	26,753	13,732	Penurunan

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan ketiga tabel diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut: -2 log *likelihood* awal padaa *block number* = 0, yaitu model yang hanya memasukkan konstanta memperoleh nilai sebesar 40,485. Kemudian pada tabel selanjutnya dapat dilihat nilai -2LL akhir dengan *block number*= 1 nilai -2 *log likelihood* mengalami perubahan setelah masuknya beberapa variable independent pada model penelitian, akaibatnya nilai -2LL akhir menunjukan nilai 26,753.

Dari perhitungan tabel Hasil Overall Model Fit diperoleh selisih positif sebesar 13,732 hal tersebut menjelaskan bila terjadi penurunan nilai antara -2LL awal dengan nilai -2LL

akhir maka  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak. Ini adalah indikasi bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data yang digunakan. Penurunan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  menunjukkan bahwa dengan menambah variabel temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bisa memperbaiki model fit.

#### Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	3.564	8	.894

Sumber: output SPSS 24 (2023)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat nilai Chi-square sebesar 3,564 dengan nilai signifikansi sebesar 0,894 atau sig. > 0,05 ( $0,894 > 0,05$ ). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, yang berarti model mampu memprediksi nilai observasi. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	26.753 <sup>a</sup>	.340	.482

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: output SPSS 24 (2023)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Cox and Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square adalah 0,340 dan 0,482. Ini berarti 48,2% dari variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 51,8% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian. Dengan kata lain, model regresi ini hanya mampu menjelaskan sebagian dari variasi dalam variabel dependen, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini.

#### Uji Matrik klasifikasi

Classification Table<sup>a</sup>

	Observed	Predicted		Percentage Correct
		Opini Audit Non-WTP	WTP	
Step 1	Opini Audit Non-WTP	6	4	60.0
	WTP	1	22	95.7
Overall Percentage				84.8

a. The cut value is .500

Sumber: output SPSS 24 (2023)

Berdasarkan tabel di atas, model regresi mampu menduga kemungkinan penerimaan opini audit WTP sebesar 95,7%. Ini berarti dari 23 LKPD yang memiliki opini audit WTP, model regresi dapat memprediksi dengan benar sebanyak 22 LKPD (95,7%). Selain itu, model regresi juga memiliki kekuatan dugaan sebesar 60% untuk memprediksi kemungkinan LKPD memiliki opini audit Non-WTP.



**Model Regresi Logistik**

	Variables in the Equation						95% C.I.for EXP(B)	
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> X1_TA	.032	.177	.033	1	.856	1.033	.729	1.462
X2_TLRHP	26.895	10.089	7.106	1	.008	4789E+11	1237.492	1854E+20
Constant	-21.110	8.643	5.965	1	.015	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: X1\_TA, X2\_TLRHP.

Sumber: output SPSS 24 (2023)

Variabel dependen (OPINI) adalah variabel yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 atau 0. Nilai 1 mengindikasikan terjadinya peristiwa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sedangkan nilai 0 mengindikasikan terjadinya peristiwa Non-WTP. Nilai dari variabel dependen terbatas pada dua kemungkinan tersebut. Namun, nilai hasil persamaan regresi logistik tidak terbatas dan dapat berada di bawah 0 atau di atas 1. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi (sig) dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) yaitu 5% atau 0,05. Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -21,110 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel opini audit belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Temuan Audit dan TLRHP. Jika variabel independen tidak ada maka variabel opini audit tidak mengalami perubahan.
- Koefisien regresi untuk Variabel Temuan Audit adalah 0,032. Nilai positif ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara Temuan Audit dan Opini Audit. Dalam konteks ini, jika terjadi kenaikan satu unit pada Temuan Audit, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka nilai Opini Audit akan meningkat sebesar 0,032. Dengan kata lain, setiap kenaikan satu Temuan Audit akan berkontribusi pada peningkatan Opini Audit sebesar 0,032.
- Koefisien regresi untuk Variabel TLRHP adalah 26,895. Nilai positif ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara TLRHP dan Opini Audit. Dalam konteks ini, jika terjadi kenaikan satu unit pada TLRHP, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka nilai Opini Audit akan meningkat sebesar 26,895. Dengan kata lain, setiap kenaikan satu TLRHP akan berkontribusi pada peningkatan Opini Audit sebesar 26,895.

**Uji Hipotesis****1. Uji t**

	Variables in the Equation						95% C.I.for EXP(B)	
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup> X1_TA	.032	.177	.033	1	.856	1.033	.729	1.462
X2_TLRHP	26.895	10.089	7.106	1	.008	4789E+11	1237.492	1854E+20
Constant	-21.110	8.643	5.965	1	.015	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: X1\_TA, X2\_TLRHP.

Sumber: output SPSS 24 (2023)

### 1) Pengujian Hipotesis pertama (H1)

Hipotesis pertama (H1) adalah temuan audit tidak berpengaruh terhadap opini audit. Pada hasil uji t variabel temuan audit memiliki nilai wald / thitung  $0,033 < t_{tabel} (2,042272)$  dan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,856 > tingkat\ signifikannya\ 0,05$  maka hipotesis ke-1 **ditolak**. Ini berarti Temuan Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Temuan Audit berpengaruh terhadap opini audit.

### 2) Pengujian Hipotesis kedua (H2)

Hipotesis kedua (H2) ) adalah TLRHP berpengaruh positif terhadap opini audit. Pada hasil uji t variable temuan audit memiliki nilai thitung  $(7,106) > t_{tabel} (2,042272)$  dan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,008 < tingkat\ signifikannya\ 0,05$  maka hipotesis ke-2 **diterima**. Ini berarti TLRHP **berpengaruh** secara positif terhadap opini audit. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa TLRHP berpengaruh terhadap opini audit.

## 2. Uji F

### Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	13.732	2	.001
	Block	13.732	2	.001
	Model	13.732	2	.001

Sumber: output SPSS 24 (2023)

Diketahui, dengan total pengamatan (n) sebesar 33 dan total variabel (independen dan dependen) (k) sebesar 3, kita dapat menghitung derajat kebebasan (df1) untuk variabel independen dan dependen menggunakan rumus  $df1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ . Selanjutnya, kita juga dapat menghitung derajat kebebasan (df2) untuk total pengamatan dan total variabel menggunakan rumus  $df2 = n - k = 33 - 3 = 30$ .

Dengan menggunakan rumus atau fungsi pada Microsoft Excel, kita dapat menghitung nilai ftabel dengan signifikansi  $\alpha = 0,05$ ,  $df1 = 2$ , dan  $df2 = 30$ . ftabel dapat dihitung sebagai berikut:

$$ftabel = FINV(\text{Probability}; \text{deg\_freedom1}; \text{deg\_freedom2})$$

$$ftabel = FINV(0,05;2;30)$$

$$ftabel = 3,31583$$

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan nilai fhitung sebesar 13,732 berarti lebih besar dari ftabel (3,31583) dengan tingkat signifikansi ( $0,001 < 0,05$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Temuan Audit dan TLRHP berpengaruh positif terhadap opini audit.

### Pembahasan

- **Pengaruh Temuan Audit Terhadap Opini Audit**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel Temuan Audit tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap opini audit atas laporan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini didukung oleh nilai koefisien t hitung

yang lebih kecil dari t tabel ( $0,033 < 2,042272$ ) dan nilai probabilitas (p-value) yang lebih besar dari 0,05 ( $0,856 > 0,05$ ). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap opini audit dapat ditolak berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas et al., 2018; Valentina, 2022) menunjukkan bahwa Temuan audit tidak mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah. Meskipun jumlah temuan audit meningkat atau lebih banyak dari tahun sebelumnya, secara parsial belum tentu mempengaruhi opini atas laporan keuangan pemerintah kota di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengukuran opini yang tidak hanya berdasarkan jumlah temuan audit, tetapi juga mempertimbangkan nilai materialitas dari temuan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan jumlah temuan audit tidak secara otomatis berdampak pada opini atas laporan keuangan pemerintah kota, karena faktor materialitas juga menjadi pertimbangan penting dalam hal ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa materialitas lebih penting dibandingkan seberapa sering temuan tersebut ditemukan. Contohnya, meskipun Kota Medan memiliki 16 temuan, sementara Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tangjungbalai memiliki 9 temuan, hal tersebut tidak mempengaruhi opini yang diberikan. Kota Medan meraih opini WTP, sementara Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tangjungbalai memperoleh opini WDP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap opini LKPD kota/kabupaten di Sumatera Utara karena tidak semua temuan di kota/kabupaten tersebut bersifat material.

- **Pengaruh TLRHP Terhadap Opini Audit**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah. Hal ini didukung oleh nilai thitung yang lebih besar dari ttabel ( $7,106 > 2,042272$ ) dan nilai probabilitas (p-value) yang kurang dari 0,05 ( $0,008 < 0,05$ ), yang menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel independen (tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan) dengan variabel dependen (opini atas laporan keuangan pemerintah). Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang telah dijalankan oleh pemerintah, semakin baik pula opini yang akan diberikan oleh auditor, karena hal tersebut menunjukkan upaya perbaikan atas kesalahan-kesalahan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya TLRHP memiliki pengaruh secara parsial terhadap opini audit yang menunjukkan arah korelasi positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kusumawati & Ratmono, 2017) menunjukan bahwa TLRHP terdahulu berpengaruh positif terhadap opini atas LKPD, pemerintah daerah melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi agar pada periode selanjutnya tidak terjadi kesalahan yang berulang dan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik.

Berdasarkan pedoman pemeriksaan BPK RI, LKPD yang telah mendapatkan opini audit disarankan untuk segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang menjadi rekomendasi. Tindak lanjut ini wajib dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya

kesalahan yang berulang di periode selanjutnya dan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, kualitas opini audit yang diberikan untuk LKPD juga dipengaruhi oleh jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut penelitian oleh (Mutiara et al., 2022), semakin tinggi persentase jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti, semakin akuntabel pengelolaan keuangan.

#### • Pengaruh Temuan Audit dan TLRHP Terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi logistik, dapat disimpulkan bahwa variabel Temuan Audit dan TLRHP secara simultan berpengaruh positif terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah, sehingga hipotesis diterima. Hal ini didukung oleh nilai  $F_{hitung}$  yang lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $13,732 > 3,31583$ ) dengan tingkat signifikansi ( $0,001 < 0,05$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Temuan Audit dan TLRHP secara simultan berpengaruh terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak hanya terfokus pada pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mencakup pemeriksaan kinerja pemerintah dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan mengungkapkan temuan berupa kelemahan dan ketidakpatuhan entitas pemerintahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, BPK juga memberikan rekomendasi atau saran terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh entitas untuk memperbaiki kelemahan dan ketidakpatuhan yang telah terjadi, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari & Ratmono, 2017). Selain itu, BPK juga memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga negara telah melaksanakan rekomendasi dengan baik.

#### KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- Secara parsial Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Opini Audit pemerintah daerah atas LKPD Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
- Secara parsial Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap Opini Audit pemerintah daerah atas LKPD Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
- Secara simultan Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Opini Audit pemerintah daerah atas LKPD Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfiani, A. N., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 9(1).
- [2] Anggarani, D., Puspitosarie, E., & Khrisna, S. H. (2021). Pengaruh Etika Audit, Fee Audit,

- 
- dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit. The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021), 655–667.
- [3] Pratama, A. B. & Maslichah. (2022). Pengaruh Opini Audit Bpk, Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017- 2019. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(02), 47–57.
- [4] Sari, V. F., Octaviani, M., & Lisdawati, Y. (2018). Studi Eksploratif Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Wahana Riset Akuntansi*, 6(1), 1213. <https://doi.org/10.24036/wra.v6i1.101943>
- [5] Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & James H. Scheiner. (2006). *Internal Auditing*. Salemba Empat.
- [6] Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. *Jurnal Ecoment Global*, 4(1), 101. <https://doi.org/10.35908/jeg.v4i1.576>

HALAMAN INI SENGAJA KAMI KOSONGKAN